



Pengaruh Moralitas Individu, Budaya Organisasi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Risiko *Fraud*

Regita Putri Cahyaningrum¹⁾, Muslimin²⁾, Avi Sunani^{*3)}

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur^{1,2,3}

Email : putriregita300@gmail.com, muslimin.ak@upnjatim.ac.id,
avi.ak@upnjatim.ac.id*

ABSTRACT

The aim of the following research is to understand the influence of individual morality, organizational culture, and the internal control system on the risk of fraud in the management of the APBDes in Buduran District. The method used is quantitative. Research results show that individual morality has a significant impact on the risk of fraud. Organizational culture does not have a significant impact on fraud risk and the internal control system does not have a significant impact on fraud risk. The conclusions from this research are as follows: (1) a high level of individual moral reasoning does not rule out the possibility that someone will commit fraud, especially in terms of APBDes management; (2) a bad culture does not guarantee that fraud does not occur, organizational culture cannot reduce fraud caused by intimidation and dishonesty of village officials who encourage agencies to achieve certain goals related to village financial fraud; (3) the village government does not implement an internal control system well, which shows a low level of internal knowledge.

Keywords: Individual Morality, Organizational Culture, Internal Control System, Fraud Risk.

ABSTRAK

Tujuan dilakukan riset berikut ialah guna memahami pengaruh bagaimana moralitas individu, budaya organisasi, serta sistem pengendalian internal pada risiko *fraud* dalam pengelolaan APBDes di Kecamatan Buduran. Metode yang digunakan ialah kuantitatif. Hasil riset memperlihatkan bahwasanya moralitas individu berdampak signifikan pada risiko *fraud*. Budaya organisasi tidak berdampak signifikan pada risiko *fraud* dan sistem pengendalian internal tidak berdampak signifikan terhadap risiko *fraud*. Kesimpulan dari riset ini sebagai berikut: (1) tingkat penalaran moral individu yang tinggi tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang akan melakukan tindakan *fraud*, terutama dalam hal pengelolaan APBDes; (2) budaya yang buruk tidak menjamin bahwa kecurangan tidak terjadi, budaya organisasi tidak dapat mengurangi kecurangan yang disebabkan oleh intimidasi dan ketidakjujuran perangkat desa yang mendorong instansi untuk mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan kecurangan finansial desa; (3) pemerintah desa tidak menerapkan sistem pengendalian internal dengan baik, yang menunjukkan tingkat pengetahuan internal yang rendah.

Kata Kunci: Moralitas Individu, Budaya Organisasi, Sistem Pengendalian Internal, Risiko *Fraud*.

PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan komponen penting dari pembangunan di tingkat desa. APBDes berfungsi sebagai alat keuangan yang memberikan sumber daya untuk berbagai program dan kegiatan desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Ferdianti & Priono, 2022). Namun, seiring dengan peningkatan jumlah anggaran yang dikelola, potensi risiko terjadinya kecurangan atau *fraud* dalam pengelolaannya juga semakin meningkat. Hal ini menjadi masalah penting, terutama di Kecamatan Buduran yang memiliki anggaran yang cukup signifikan.

Seberapa besar atau kecil anggaran tersebut tergantung pada bagian pendapatan yang masuk dalam APBDes. Mayoritas perolehan desa bersumber melalui dana desa yang diberikan kepada setiap desa oleh pemerintah pusat. Jika anggaran desa dikelola dengan baik, pembangunan desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (PDTT, 2022). Namun, banyak pemerintah desa yang tidak mempergunakan anggarannya secara baik, sehingga perancangan dan implementasi APBDes belum selesai sepenuhnya.

Saat ini, dana desa dianggap sebagai sumber utama kasus korupsi di Indonesia. Selama semester I tahun 2021, dana desa mengalami kejadian korupsi paling banyak yang menyebabkan kerugian sebesar Rp16,6 miliar (ICW, 2021). Hasil tersebut adalah hasil pantauan tren penindakan peristiwa korupsi selama semester I tahun 2021:

Tabel 1. Pemetaan Kasus Korupsi Sektor pada Semester I 2021

No.	Sektor	Jumlah Kasus	Jumlah Kerugian Negara (Rp miliar)
1	Dana Desa	55	35,7
2	Pemerintahan	23	101,7
3	Pendidikan	23	31,5
4	Perbankan	12	500,6
5	Pertanahan	11	1.701 (1,701 triliun)

Sumber: ICW (2021)

Tabel 1 menunjukkan bahwa dana desa memiliki jumlah kasus terbanyak 55 dengan mencapai kerugian negara Rp35,7 miliar. Salah satunya adalah fenomena yang terjadi pada tahun 2021 di desa Banjarkemantren Kecamatan Buduran, yang menunjukkan adanya risiko terjadinya *fraud* dalam pengelolaan APBDes (Jatim Online, 2021). ICW tidak cuma memantau kasus yang berkaitan dengan dana desa juga melibatkan alokasi dana desa dan pendapatan asli desa.

Jumlah kasus pengelolaan keuangan desa menunjukkan kelemahan sistem. Ini karena budaya organisasi yang tidak didukung oleh perilaku etis, komitmen

perangkat desa dan sistem pengendalian internal yang belum digunakan sepenuhnya. Selain itu, karena banyaknya dana yang disediakan oleh desa menyebabkan perangkat desa sering mengabaikan moralitas hanya untuk kepentingan kelompoknya dan dirinya sendiri.

Fenomena *fraud* pada anggaran desa terjadi di desa Banjarkemantren, Buduran, Sidoarjo. Pertama, fenomena *fraud* pada tahun 2021 dijalankan oleh Kepala Desa Banjarkemantren Kasmuri. Dalam kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan Anggaran Dana Desa, ditemukan bahwa kepala desa menggunakan mal administrasi seperti Pul data dan Pulbaket (Jatim Online, 2021). Selain mengurangi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, penyalahgunaan ini dapat menghambat proses penyidikan dan pengungkapan kebenaran oleh pihak berwenang. Kedua, fenomena *fraud* pada tahun 2023 yang dilakukan oleh Kepala Desa Sidokerto Ali Nasikin. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah salah satu upaya utama pemerintah nasional untuk menghentikan pungutan liar. PTSL harus digunakan dengan benar dan tidak disalahgunakan untuk keuntungan pribadi atau kelompoknya. Pungutan liar tersebut mencerminkan praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang bertanggungjawab atas pendaftaran tanah (JatimPos, 2023).

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan, maka diperlukan suatu cara untuk mengurangi risiko *fraud* yang terdapat dalam pengelolaan keuangan desa. Menurut Kementerian Perindustrian (2023), karena praktik penipuan sangat merugikan dan mengancam keberlangsungan manajemen pemerintah yang baik dan bersih, pimpinan harus berusaha untuk mengurangi kemungkinan *fraud*. Dalam hal ini, berbagai kebijakan pengendalian *fraud* penting untuk diterapkan dalam tata kelola birokrasi pemerintah. Untuk menerapkan manajemen risiko kecurangan, lima prinsip dasar harus diterapkan: manajemen risiko kecurangan; evaluasi risiko kecurangan; operasi pengendalian kecurangan; investigasi dan tindakan pencegahan kecurangan; dan operasi pengawasan risiko kecurangan. Oleh karena itu, diharapkan bahwa instansi pemerintah dapat menggunakan prinsip-prinsip ini untuk memitigasi risiko ketika menangani kecurangan.

Instansi dapat memperkirakan risiko kecurangan yang mungkin terjadi dan melakukan tindakan pencegahan sejak awal dengan menerapkan *Fraud Risk Management* (FRM) yang mencakup tahap pencegahan, deteksi dan respons (Wijaya, 2015). Ini menjamin bahwa seluruh kegiatan organisasi berjalan dengan baik dan mencapai tujuan. Tahapan pencegahan, deteksi dan respon yang merupakan pendekatan komprehensif dalam mengelola risiko kecurangan di dalam suatu instansi. Dengan menerapkan *Fraud Risk Management* (FRM) secara efektif, instansi dapat mengelola, mengurangi, dan mengidentifikasi risiko kecurangan dengan lebih

baik, sehingga menjaga integritas operasional dan mencapai tujuan instansi secara efisien dan transparan.

Riset ini menggunakan teori *fraud hexagon* dan perilaku terencana. Teori perilaku terencana pertama kali dikembangkan oleh Martin Fisben dan Icek Ajzen pada tahun 1991. Seseorang memiliki tiga komponen utama yang memengaruhi keinginan untuk melakukan sesuatu. Faktor-faktor seperti budaya organisasi yang memengaruhi norma subjektif individu, sikap terhadap tindakan *fraud*, dan sistem pengendalian internal memengaruhi bagaimana individu melihat kemudahan atau kesulitan melakukan tindakan *fraud* (Ajzen, 1991). Menyempurnakan teori kecurangan yang dibuat oleh Cressey (1953) yang dikenal sebagai *fraud triangle*, *fraud hexagon* menggabungkan teori kecurangan yang melatarbelakangi tindakan kecurangan. Vousinas (2019) menyatakan bahwa model penipuan pentagon harus diperbarui untuk menyesuaikannya dengan peningkatan insiden penipuan saat ini. Dalam teori *fraud hexagon*, kolusi ditambahkan ke semua faktor sebelumnya; tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kemampuan, dan arogansi.

Hubungan Moralitas Individu terhadap Risiko *Fraud*

Moralitas ialah perilaku yang selaras yang dilaksanakan menurut norma yang diterima masyarakat dan biasanya berhubungan pada penilaian tindakan dan norma manusia (Wijaya et al., 2017). Jika seseorang mempunyai taraf penalaran moral tinggi, alhasil seseorang tersebut cenderung tidak berperilaku curang dan begitupun sebaliknya apabila taraf penalaran yang dimilikinya rendah alhasil seseorang tersebut cenderung akan berperilaku curang. Moralitas individu berperan besar dalam membentuk sikap, norma, dan kontrol perilaku yang mempengaruhi niat dan perilaku seseorang sesuai dengan teori *planned behavior*.

Moralitas individu dalam pandangan TPB bukan hanya tentang memahami apa yang benar atau salah, tetapi juga bagaimana faktor-faktor sikap, tekanan sosial, dan persepsi kontrol dapat mempengaruhi niat dan tindakan moral seseorang. Perilaku moral individu adalah hasil dari interaksi antara sikap moral yang dimiliki, harapan sosial yang dirasakan, dan keyakinan tentang kemampuan individu untuk bertindak sesuai dengan norma moral tersebut. Menurut Ajzen (1991), menunjukkan bahwa perilaku etis dapat dijelaskan melalui TPB ketika moralitas individu dipertimbangkan dalam pembentukan sikap dan norma sosial.

Menurut penelitian Ike Abdi Nurjanah (2021) dan Syamsudin et al. (2023) menemukan bahwasanya moralitas seseorang berdampak pada kecenderungan saat menjalankan kecurangan. Maknanya, makin tinggi moralitas seseorang maka makin besar kemungkinan melakukan kecurangan.

Hubungan Budaya Organisasi terhadap Risiko *Fraud*

Menurut Sarpin (1995 dalam Junaidi 2023), budaya organisasi terdiri dari prinsip, keyakinan dan kebiasaan yang disetujui dan dianut oleh anggota kelompok. Membangun budaya yang jujur dan tinggi adalah salah satu cara untuk menanggulangi kecurangan. Budaya organisasi yang baik memperkecil adanya kecurangan.

Mengacu pada teori *fraud hexagon* dalam budaya organisasi adalah bahwa budaya organisasi tidak hanya dipicu oleh faktor individu seperti tekanan dan rasionalisasi, tetapi juga oleh kelemahan sistem organisasi seperti kesempatan yang timbul akibat kontrol internal yang lemah serta kapabilitas pelaku yang memungkinkan kecurangan terjadi. Selain itu, faktor arogansi dan kolusi dalam organisasi juga dapat memperbesar risiko kecurangan.

Susilawati dan Dewi (2018) menemukan bahwasanya budaya organisasi memengaruhi *fraud*. Secara keseluruhan, budaya organisasi yang kuat dalam integritas, transparansi, dan etika secara signifikan menurunkan risiko *fraud* dengan mempengaruhi semua elemen teori *fraud hexagon*, sedangkan budaya organisasi yang lemah dapat meningkatkan risiko *fraud* dengan memperburuk kolusi, kesempatan, dan rasionalisasi.

Hubungan Sistem Pengendalian Internal terhadap Risiko *Fraud*

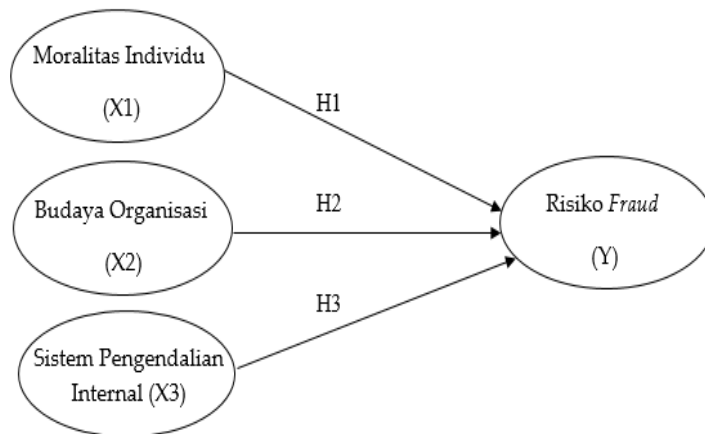
Jika ada kelemahan dalam sistem pengendalian internal, ada kemungkinan kecurangan akan terjadi. Akibatnya, sistem pengendalian internal yang efektif diperlukan untuk mengurangi kesalahan atau risiko yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan desa dan memastikan bahwa laporan ini dibuat berdasarkan aturan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Mengacu pada teori *fraud hexagon*, sistem pengendalian internal yang menyeluruh organisasi dapat meminimalkan risiko kecurangan dengan mengatasi langsung faktor-faktor yang diidentifikasi dalam *fraud hexagon*. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang transparan dan aman serta memastikan bahwa semua individu dalam organisasi mematuhi standar etika dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Toisuta et al. (2019) serta Susilawati & Dewi (2018) menunjukkan bahwasanya sistem pengendalian internal mempengaruhi risiko penipuan. Teori *fraud hexagon* menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal adalah salah satu komponen utama yang memengaruhi terjadinya *fraud*. Dengan demikian, sistem pengendalian internal yang efektif memainkan peran penting dalam mengelola risiko *fraud*. Sistem yang baik mengurangi kemungkinan penipuan dalam organisasi, mencegah kolusi,

menurunkan tekanan, membatasi kemampuan, mengurangi rasionalisasi, dan menekan ego.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



Sumber: Data diolah peneliti (2024)

METODE PENELITIAN

Riset berikut memakai jenis riset kuantitatif, yang berarti menemukan pengetahuan melalui cara mengubah data menjadi angka. Angka-angka ini akan dikumpulkan dan digunakan untuk melakukan analisis keterangan. Moralitas individu, budaya organisasi, sistem pengendalian internal serta risiko *fraud* adalah variabel yang dipakai pada riset ini. Penelitian mengamati pegawai yang ikut dalam pengelolaan APBDes di 15 kantor pemerintah desa di Kecamatan Buduran. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa adalah bagian dari perangkat desa, diantaranya Kepala Desa, Kepala Urusan Keuangan, Sekretaris Desa, Kepala Seksi Pemerintahan serta Kepala Seksi Pelayanan. Sampel penelitian dipilih berdasarkan kriteria tertentu dari 75 pegawai perangkat desa yang berpartisipasi dalam penelitian. *Software SmartPLS* versi 4.0 digunakan untuk melakukan analisis data.

Data dikumpulkan melalui kuesioner yang diberi skala *likert* dari 1 hingga 5. Validitas konvergen, diskriminan, dan reliabilitas diuji guna menjamin bahwasanya data yang didapatkan valid dan reliabel. Untuk uji reliabilitas menggunakan nilai *composite reliability*, dapat dianggap memenuhi kriteria jika nilainya $>0,7$ (Ghozali, 2021:70). Setelah melakukan uji kevalidan dan reliabilitas selanjutnya pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis adalah langkah pengambilan keputusan dimana peneliti mengevaluasi hasil penelitian di setiap langkah yang akan dilakukan. Hipotesis diuji dengan *t-statistics*, *p-value* dan *original sample*. Nilai *original sample* digunakan untuk menunjukkan signifikan; jika skornya menunjukkan arah positif, menandakan arahnya positif dan bila skornya menunjukkan arah negatif, menandakan arahnya negatif.

Untuk menguji *t-statistics*, perlu diketahui apakah hipotesis memiliki atau tidak. Semua hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini tidak memiliki arah, sehingga nilai *t-statistics* >1,64 dikatakan jika hipotesis memiliki arah dan nilai *t-statistics* >1,96 apabila hipotesis tidak memiliki arah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

OUTER MODEL

Uji Validitas Konvergen

Tabel 2. Outer Loadings

	X1 Moralitas Individu	X2 Budaya Organisasi	X3 Sistem Pengendalian Internal	Y Risiko Fraud
X11	0.731			
X12	0.765			
X13	0.810			
X14	0.762			
X15	0.833			
X21		0.852		
X22		0.873		
X23		0.858		
X24		0.782		
X25		0.735		
X31			0.802	
X32			0.868	
X33			0.823	
X34			0.800	
Y11				0.751
Y12				0.859
Y13				0.757
Y14				0.808
Y15				0.787
Y16				0.708

Sumber: Data diolah peneliti (2024)

Beberapa indikator memenuhi ketentuan *loading factors*, yaitu di atas 0,5 seperti yang ditunjukkan dalam tabel 2, bahwa hasil pengolahan data dapat dianggap valid (Sunani et al., 2024).

Uji Validitas Diskriminan**Tabel 3.** Hasil Pengujian AVE

Variabel	AVE
Moralitas Individu	0.610
Budaya Organisasi	0.675
Sistem Pengendalian Internal	0.678
Risiko <i>Fraud</i>	0.608

Sumber: Data diolah peneliti (2024)

Semua variabel memiliki nilai AVE >0,5, seperti yang ditunjukkan dalam tabel 3. Dari temuan ini, disimpulkan bahwa semua variabel yang ada adalah valid.

Uji Reliabilitas**Tabel 4.** *Composite Reliability*

Variabel	Composite Reliability
Moralitas Individu	0.886
Budaya Organisasi	0.912
Sistem Pengendalian Internal	0.894
Risiko <i>Fraud</i>	0.903

Sumber: Data diolah peneliti (2024)

Karena setiap variabel mempunyai skor *composite reliability* >0,7 bisa ditarik simpulan bahwasanya semua variabel yang ada dianggap reliabel dan dapat digunakan untuk uji analisis tambahan seperti yang ditunjukkan dalam tabel 4.

INNER MODEL**Tabel 5.** Hasil *R-Square*

Y	<i>R-Square</i>
Risiko <i>Fraud</i>	0.849

Sumber: Data diolah peneliti (2024)

Untuk variabel risiko *fraud*, tabel 5 menunjukkan skor *R-square* senilai 0,849 yang menunjukkan bahwasanya model sanggup menjelaskan risiko *fraud* dengan nilai 0,849 atau 84,9%. Variabel lain yang dipengaruhi oleh moralitas individu, budaya organisasi serta sistem pengendalian internal memberikan nilai 0,151 atau 15%.

Uji Hipotesis

Tabel 6. Pengujian Hipotesis

Variabel X -> Variabel Y	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T-Statistic (IO/STDEV)	P-Values
Moralitas Individu -> Risiko <i>Fraud</i>	0.774	0.767	0.197	3.932	0.000
Budaya Organisasi -> Risiko <i>Fraud</i>	0.067	0.071	0.155	0.434	0.665
Sistem Pengendalian Internal -> Risiko <i>Fraud</i>	0.102	0.106	0.092	1.109	0.267

Sumber: Data diolah peneliti (2024)

Bersumber melalui tabel 6 memperlihatkan bahwasanya moralitas individu berdampak signifikan pada risiko *fraud*. Skor *T-statistic* senilai 3.932 melampaui 1,96 dan skor *P-value* senilai 0.000 kurang dari 0,025 ($P < 0,025$), budaya organisasi tidak berdampak signifikan pada risiko *fraud*. Kondisi tersebut bisa dicermati melalui skor *T-statistic* senilai 0.434 kurang dari 1,96 serta pada *P-values* senilai 0.665 yang menandakan melampaui 0,025 ($P > 0,025$) dan sistem pengendalian internal tidak berdampak signifikan pada risiko *fraud*. Kondisi tersebut bisa dicermati melalui *T-statistic* senilai 1.109 kurang dari 1.96 serta pada skor *p-values* senilai 0.267 melampaui 0,025 ($P > 0,025$).

PEMBAHASAN

Pengaruh Moralitas Individu terhadap Risiko *Fraud*

Moralitas individu berpengaruh signifikan terhadap risiko *fraud*, seperti yang ditunjukkan oleh tabel pengujian hipotesis. Moralitas individu merupakan kepercayaan yang ada di dalam hati seseorang dan dianggap sebagai tanggung jawab yang harus dipenuhi (Sholehah et al., 2018). Salah satu alasan mengapa individu melakukan kecurangan adalah karena dorongan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Moralitas memainkan peran kunci dalam mencegah atau memfasilitasi terjadinya kecurangan tersebut (Ramizah et al., 2023).

Moralitas individu berperan besar dalam membentuk sikap, norma, dan kontrol perilaku yang memengaruhi niat dan perilaku seseorang sesuai dengan teori *planned behavior*. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka bisa dilihat dari nilai terkait perbuatan kecurangan dalam suatu instansi dan faktor-faktor apa yang

mendasari seseorang berperilaku tersebut (Mustika, 2024). Teori perilaku terencana mengungkapkan bahwasanya sikap individu atas perilaku ialah suatu yang penting dan bisa memperkirakan perbuatan. Namun, perilaku dilaksanakan atas pertimbangan sikap individu saat menguji norma subjektif serta pengukuran kontrol perilaku persepsi individu tersebut.

Penelitian berikut diperkuat oleh Ike Abdi Nurjanah (2021) dan Syamsudin et al., (2023) yang menemukan bahwa moralitas individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap risiko *fraud*. Ini menunjukkan bahwa moralitas individu yang kuat berperan penting dalam mencegah penipuan. Individu dengan prinsip moral yang kuat biasanya tidak berpartisipasi dalam aktivitas penipuan, terlepas dari adanya peluang atau paksaan dari luar. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fernandhytia (2020) yang menemukan bahwasanya moralitas individu tidak berpengaruh signifikan pada risiko penipuan. Jika moralitas individu meningkat, kecenderungan kecurangan akan berkurang. Dengan kata lain, tingkat moralitas individu akan mempengaruhi aktivitas pengambilan keputusan dalam kehidupan seseorang.

Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Risiko *Fraud*

Budaya organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap risiko *fraud*, seperti yang ditunjukkan oleh tabel pengujian hipotesis yang menunjukkan bahwa hipotesis kedua ditolak. Budaya organisasi yang baik terdiri dari norma dan kebiasaan yang disepakati dan diterapkan oleh setiap anggota. Budaya organisasi ini memajukan perilaku yang baik. Setiap pegawai memiliki kesempatan untuk melakukan kecurangan yang dipengaruhi oleh kesempatan tersebut. Ini disebabkan oleh fakta bahwa pegawai menganggap tindakan tersebut sebagai hal yang normal atau wajar terjadi (Tyas et al., 2023).

Budaya organisasi berperan penting dalam mengelola risiko *fraud* dan dapat dianalisis dengan teori *fraud hexagon*. Teori ini menambahkan elemen-elemen baru pada teori *fraud* sebelumnya untuk memahami penyebab *fraud* secara lebih mendalam. Secara keseluruhan, budaya organisasi yang kuat dalam integritas, transparansi, dan etika secara signifikan mengurangi risiko *fraud* dengan mempengaruhi semua elemen dalam teori *fraud hexagon*. Sebaliknya, budaya yang lemah dapat meningkatkan risiko *fraud* dengan memperburuk kolusi, kesempatan, dan rasionalisasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Ike Abdi Nurjanah (2021) dan Putri (2019) menemukan bahwasanya budaya organisasi tidak mempengaruhi kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa budaya yang buruk di tempat instansi tidak menjamin kecurangan. Karena intimidasi dan ketidakjujuran pimpinan terhadap pegawai, budaya organisasi tidak dapat mengurangi kecurangan. Akibatnya, pimpinan dengan sengaja mendorong pegawai untuk bercurangi tentang keuangan desa. Namun,

berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Susilawati & Dewi (2018) menemukan bahwasanya budaya organisasi mempengaruhi kejadian *fraud*.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Risiko *Fraud*

Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap risiko *fraud*, seperti yang ditunjukkan oleh tabel pengujian hipotesis yang menunjukkan bahwa hipotesis ketiga ditolak. Semakin banyak sistem pengendalian internal yang ada dalam suatu organisasi, semakin rendah kemungkinan terjadi kesalahan. Akibatnya, lebih sedikit kemungkinan kecurangan terjadi. Sistem pengendalian internal mencakup semua tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai.

Berdasarkan teori *fraud hexagon* pemicu terjadinya kecurangan ada beberapa faktor, salah satunya yaitu adanya kesempatan (*opportunity*). Berkaitan dengan teori tersebut maka sistem pengendalian internal di pemerintah desa yang lemah akan menyebabkan terjadinya kesempatan atau peluang bagi individu kejahatan untuk melakukan tindakan kecurangan (Tyas et al., 2023). Sistem pengendalian internal yang kuat dapat mengurangi kesempatan bagi pelaku *fraud*, meningkatkan kemampuan organisasi untuk mendeteksi dan mencegah *fraud* serta menciptakan lingkungan yang tidak mendukung untuk tindakan kecurangan.

Menurut Ike Abdi Nurjanah (2021) dan Fernandhytia (2020) pengendalian internal tidak mempengaruhi kecurangan. Ini menunjukkan bahwasanya adanya pegawai yang tidak bertanggungjawab sehingga meningkatkan kemungkinan kecurangan. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Tri et al., (2022) yang menemukan bahwa pengendalian internal memengaruhi kemungkinan kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian internal yang baik dapat mencegah kecurangan. Semakin baik pengendalian internal, lebih sedikit kemungkinan kecurangan terjadi. Selain itu, pengendalian internal yang baik dapat mencegah niat dan keinginan seseorang untuk melakukan kecurangan.

KESIMPULAN

Hasil pengujian menunjukan bahwa: (1) Moralitas individu mempunyai dampak signifikan pada risiko *fraud* pada pengelolaan APBDes. Dengan kata lain, tingkat penalaran moral individu yang tinggi tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang akan melakukan tindakan *fraud*, terutama dalam hal pengelolaan APBDes; (2) Budaya organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap risiko *fraud* dalam pengelolaan APBDes. Dengan kata lain, meskipun budaya yang buruk tidak menjamin bahwa kecurangan tidak terjadi, budaya organisasi tidak dapat mengurangi kecurangan yang disebabkan oleh intimidasi dan ketidakjujuran perangkat desa yang mendorong instansi untuk mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan kecurangan finansial

desa; (3) Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap risiko *fraud*. Hal ini karena pemerintah desa tidak menerapkan sistem pengendalian internal dengan baik, yang menunjukkan tingkat pengetahuan internal yang rendah. Saran yang diberikan dalam penelitian ini: (1) Pemerintah desa harus mempelajari dan memahami pengelolaan APBDes dengan mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis. Ini akan memungkinkan pengelolaan APBDes dilakukan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku dengan hasil yang lebih baik; (2) Diharapkan peneliti yang akan datang dapat menggunakan metode pengumpulan data yang lebih mendalam, yang mencakup wawancara, observasi, dan penyebaran kuesioner serta dapat memasukkan variabel tambahan yang belum dimasukkan ke dalam penelitian saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior Human Decision Processes*, 50: 179-211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Fathia, J., & Indriani, M. (2022). Pengaruh Sistem Keuangan Desa Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pengelolaan Dana Desa Dengan Moralitas Individu Sebagai Pemoderasi (Studi di Desa Kabupaten/Kota Provinsi Aceh). *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 4(0), 455-468. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art57>
- Ferdianti, G. E., & Priono, H. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Apbdes Di Kecamatan Prambon. *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 11(2), 28. <https://doi.org/10.35906/equili.v11i2.1103>
- Fernandhytia, F. (2020). *The effect of internal control, individual morality and ethical value on accounting fraud tendency*. 35(1), 112–127. <https://doi.org/10.24856/mem.v35i1.1343>
- Ghozali, I. (2021b). *Partial Least Squares Konsep, Teknik Dan Aplikasi Smartpls 3.2.9*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Diponegoro. <https://doi.org/10.1002/9780470517253.ch10>
- Jatim Online. (2021). Diakses pada 18 Juli 2024 dari <https://jatimonline.net/diduga-masuk-angin-kasus-dugaan-korupsi-kades-banjarkemantren-di-kejari-sidoarjo-jalan-di-tempat/>
- Jatimpos.com. (2023). Program Sertifikat Tanah PTSL Desa Sidokerto Buduran Diduga Tercium Aroma Korupsi. Diakses pada 18 Juli 2024, dari <https://www.jatimpos.co/hukum/11511-program-sertifikat-tanah-ptsl-des-sidokerto-buduran-diduga-tercium-aroma-korupsi>
- Junaidi, G., Akbar, A., Natsir, U, D., & Musa, C. I. (2023). Pengaruh Kompetensi dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Pengelola Keuangan

Daerah Kabupaten Enrekang. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi*, 1(6), 1593-1604. <https://doi.org/10.51747/jumad.v1i2.1387>

Kementrian Perindustrian. (2023). Diakses pada 18 Juli 2024 <https://itjen.kemenprin.go.id/post/pencegahan-fraud-melalui-manajemen-risiko>

Kurniasari, N. T., Fariyanti, A., & Ristiyanto, N. (2018). Strategi Pencegahan kecurangan (Fraud) dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Menggunakan Analytical Hierarchy Process. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah Volume 10 Nomor Khusus, April 2018*, 24–32. https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v10i-.22693

Natasya, T. N., Karamoy, H., & Lambey, R. (2019). Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Pengendalian Internal Terhadap Resiko Terjadinya Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Di Rumah Sakit Bhayangkara Tk. Iv Polda Sulut. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 847–856. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18274.2017>

Noviani, N., Nurmala, P., & Adiwibowo, A. S. (2021). Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Moralitas Individu, Dan Audit Internal Terhadap Risiko Fraud. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 19(2), 188-202. <https://doi.org/10.58192/populer.v2i3.1247>

Nurjanah, I. A., & Setiawan, M. A. (2021). Pengaruh Pengendalian Internal, Moralitas Individu dan Budaya Organisasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pemerintah Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(3), 517–528. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i3.396>

Putri, D. C., Hartono, H., & Hidayat, N. E. (2019). Pengaruh Moralitas Individu, Pengendalian Internal dan Budaya Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Riset Akuntansi dan Akuntansi*, 2(2).

Ramizah, A., Widiastuty, E., & Febrianto, R. (2023). Determinan Kecurangan Akuntansi Studi Literatur Review (2016-2020). *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Teknologi Informasi Akuntansi*, 4(1), 58–71. <https://doi.org/10.36085/jakta.v4i1.5276>

Santi Putri Laksmi, P., & Sujana, I. K. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 2155. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p18>

Sholehah, N. I. H., Rahim, S., & Muslim, M. (2018). Pengaruh Pengendalian Internal, Moralitas Individu dan Personal Culture Terhadap Kecurangan Akuntansi

- (Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Gorontalo). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 40-54. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v1i1.58>
- Sholihin, M., & Ratmono, D. (2021). *Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 7.0 untuk Hubungan Nonlinier dalam Penelitian Sosial dan Bisnis* (p.329). Andi.
- Sugiyono (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, P. D. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sunani, A., Widodo, U. P. W., Wijaya, R. M. S. A. A., & Kirana, N. W. I. (2024). Environmental disclosure analysis of manufacturing companies to realize sustainable green economy. *Intangible Capital*, 20(2), 321–342. <https://doi.org/10.3926/ic.2505>
- Suryo, T. E., Betari, M., & Purwantini, A. (2023). Pengaruh Pengendalian Internal, Moralitas Individu, Komitmen Organisasi Dan Budaya Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Accounting Research Journal*, 3(2), 26-39.
- Susilawati, S., & Dewi, R. A. K. (2018). Budaya Organisasi, Efektivitas Pengendalian Internal Dan Fraud. *Jurnal INTEKNA : Informasi Teknik Dan Niaga*, 18(1), 47–52. <https://doi.org/10.31961/intekna.v18i1.552>
- Syamsudin, Tobing, K. S. L., Ria, Digdowiseiso, K., & Ilias, N. (2023). The Impact of Internal Control System and Individual Morality on Fraud in Indonesia: A Literature Study. *IJEMBIS: International Journal of Economics, Management, Business and Social Science*, 3(2), 541-548. <https://cvodis.com/ijembis/index.php/ijembis/article/view/249>
- Tri, N., Kristanti, R., & Latifah, N. (2022). Pengaruh Moralitas, Asimetris Informasi dan Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Dana Desa Pada Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap. *Jurnal Ekonomi*, 12(2), 73-82.
- Widiyarta, Nyoman & Anantawikrama (2017) Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, Whistleblowing dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Buleleng). *JIMAT: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 8(2), 1-12. <https://doi.org/10.23887/jimat.v8i.13930>.
- Wijaya, K. D. S., Sujana, E., & Purnamawati, I. G. A. (2017). Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Moralitas Individu, Dan Whistleblowing Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Lpd Di Kecamatan Gerokgak. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 7(1) <https://doi.org/10.23887/jimat.v7i1.10154>